

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Adolf, Huala. 2011. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media.
- Ali, Zainudin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Gellhorn, E. (2024). *Hukum dan Proses Administrasi*. Nuansa Cendekia.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhammadong, N. (2017). Implementasi Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Holrev*, 1(2), 169.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, “Penelitian Hukum”, Jakarta: Kencana Prenada.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, "Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simanjuntak, E. (2021). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UI Press
- Taufiqurrohman, dkk. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sukabumi: Haura Utama

Wicipto Setiadi, 2022, *“Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”*, Jakarta: Damera Press

Tesis

Ali, F. F. A. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Lex Administratum

Arakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila Oleh : Made Hendra Wijaya, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Baherman, H. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif Sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Study Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Admininstratif) (Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu)*.

Fatoni, A. W. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Administrasi Pemerintahan Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Birokrasi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Sultan Agung)*.

Hasibuan, A. (2018). *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 607/Pid B/2016/PN. Mdn)*.

Ibrahim, N. (2020). *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*.

Marwasih, A. (2018). *Konsekuensi Yuridis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kompetensi Absolut PTUN (Master's thesis)*.

Maulana, A. (2023). *Analisis Tentang Penetapan Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Slawi Menurut Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Doctoral Dissertation, S1-Hukum Keluarga)*.

Resmana, S. D. R. S. D. (2020). *Kajian Yuridis Penyelesaian Upaya Administratif Sebelum Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Dalam Putusan Nomor 13/G/2019ptun. Pdg Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan*

- Santiadi, K. (2023). Pengaturan Dan Penerapan Upaya Administratif Dalam Konteks Sistem Peradilan Administrasi Di Indonesia.
- Septiningsih, I., Ridayanti, A., Kurniawan, I. D., & Suyatno, S. (2023). *Relevansi Pengaturan Dalam Penyelesaian Permasalahan Sengketa Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Ptun). Research Fair Unisri.*
- Syahriyah, E. (2024). Pertimbangan Hakim PTUN Surabaya pada sengketa putusan nomor: 124/G/TF/2023/PTUN. SBY upaya administratif perspektif Siyāsah Qaḍhā'iyah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Jurnal/Karya Ilmiah:

- Akbar, M. K. (2021). Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. " Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI, 1(1), 16.
- Akbar, M., & bakti Harahap, S. (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri. Jurnal Smart Hukum (JSH), 1(1), 229-237.
- Ali, F. F. A. (2021). Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lex Administratum, 9(8).
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. Administrative Law and Governance Journal, 3(1), 114-123.
- Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi sebagai penegak hukum dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2(3), 359-372.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166-176.
- Arif, I. A. L., & Boediningsih, W. (2022). Analisis Terhadap Putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang terkait dengan Pembatalan Penerapan Pasal 87 ayat (4) UU ASN. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(1), 24-39.

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.
- Arta, I. K. K., & WiraSena, I. G. A. (2022). Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Di Keluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Kertha Widya*, 9(2), 97-110.
- Asimah, D., Muttaqin, Z., & Sugiharti, D. K. (2020). Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood). *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(1), 152-170
- Astomo, P. (2018). Prinsip-Prinsip Negara Hukum Indonesiadalam Uud Nri Tahun 1945. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 1-12.
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713-724.
- Brunt, Helen. 2015. *The Vulnerability of Bajau Laut (Sama Dilaut) Children in Sabah, Malaysia*. Asia Pacific Refugee Right Network Maret 2015.
- Budiastuti, S. R. (2019). Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid. Sus/2015/PN. *Yyk. Jurnal Wacana Hukum*, 25(2), 16.
- Dotulong, S. (2018). Analisis Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara yang Dikeluarkan Tanpa Wewenang sebagai Objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 6(4).
- Gaspersz, D., Pietersz, J. J., & Pattipawae, D. R. (2023). Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara Nomor: 26/G/2020/Ptun. *Abn. Jurnal Saniri*, 3(2), 50-64.
- Gera, D. S. (2023). A Study On Administration Of Justice In India. *Innovative Research Thoughts*, 9(2), 99-105.
- Guimaraes, T. A., Gomes, A. O., & Guarido Filho, E. R. (2018). Administration of justice: an emerging research field. *RAUSP Management Journal*, 53(3), 476-482.
- Hadi, M. (2014). Tanggung Jawab BPN terhadap sertipikat yang dibatalkan PTUN. *Lex et Societatis*, 2(7).
- Hardi, R. (2017). Batas Usia Dewasa Dalam Perbuatan Hukum Pengajuan Kredit Perbankan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 2(1), 1-13

- Hardi, W. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Heriyanto, B. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *PALAR (Pakuan Law review)*, 4(1).
- Indriati, E. D. (2020, May). Storage of functions and values from Pancasila in law enforcement as a guideline of life in community. In *International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020)* (pp. 323-327). Atlantis Press.
- Irianto, S. (2019). Urgensi Hermeneutika dalam Hukum Kontrak. *Spektrum Hukum*, 13(2), 181-193.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127-140.
- Jaelani, A. K. (2020). Implementasi Daluarsa Gugatan Dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2).
- Jaelani, A. Q. J. (2017). Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).
- Jaya, A., & Susanti, E. (2022). Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 4(1), 80-93.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Anak Hebat Indonesia.
- Jiwantara, F. A. (2019). Upaya Administratif Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. *Jatiswara*, 34(2), 131-142.
- Kaharuddin dan Zul Amirul Haq. (2024). Ilmu Negara Transformasi Konsep Kenegaraan dari Masa ke Masa. *PT Rajagrafindo Persada*, 27
- Kaharuddin dan Zul Amirul Haq. (2024). Kecerdasan Buatan Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi, *Prena Media Group*, 83
- Koraag, S. (2021). Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat

Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. *Lex Administratum*, 9(7).

- Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan instrumen hukum administrasi negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 416-433.
- Marvin, R. A. (2019). Polemik jangka waktu pengajuan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 942-958.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Musa, M., Wiarti, J., & Endri, E. (2023). Matinya Rule Breaking: Postulat Penalaran Hakim dalam Memutus Bebas Perbuatan Cabul (Kajian Putusan Bebas Perkara No. 46/Pid. B/2022/PN Pbr). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 285-306.
- Nazra, W. A. (2021). Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Nugraha, B. W. (2022). Alamat Mengajukan Gugatan Dan Tuntutan Di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Oktavianto, F., Pardomuan, J. D., & Syahuri, T. (2023). HUKUM POSITIVISME Terhadap Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Pembegalan. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(4), 90-99.
- Palilingan, T. N., Mamahit, C. E. M., & Midu, S. (2023). Tantangan dan Perkembangan Upaya Administrasi dalam Penyelesaian Perkara Pertanahan. *Amanna Gappa*, 94-107.
- Panderoot, E. G. E. (2021). Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 9(2), 15-25.
- Parlina, N. (2021). Regulasi dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi dalam Sengketa Administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jatiswara*, 36(2), 163-176.
- Prahastapa, A. M. R., Leonard, L. T., & Putriyanti, A. (2017). Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan Dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.

- Pulung Hudoprakoso, Pemberlakuan Upaya Administrasi Sebagai Premium Remedium Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara, *Jurnal Juristic Volume 03 Nomor 01 April 2022*, hlm. 93-94.
- Putri, A. A., Hariansah, S., & Marhayani, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Properti di Kota Pangkalpinang. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 2(2), 115-125.
- Putrijanti, A., Leonard, L. T., & Utama, K. W. (2018). Peran PTUN dan AUPB menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(2), 277-290.
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806-5811.
- Ramli, L., & Saputro, A. (2022). Women Civil Servant Official Versus Administrative Court Lawsuit: Mental Resistance or Mental Disorder?. *Journal BiLD Law Journal*, 7(2), 73-84.
- Remaja, I. N. G. (2021). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Ganda. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 111-120.
- Ridwan, H. R., Heryansyah, D., & Pratiwi, D. K. (2018). Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 339-358.
- Ridwan. (2023). The Existence And Urgency Of Administrative Efforts In The Administrative Justice And Regulation. *Journal of Governance and Regulation*, Vol 12.
- Risdianto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas Di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Persamaan Di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 125-142.
- Rurugala, Y. P., Rompas, D. D., Rurugala, H. Y. B. Y. P., Rompas, D. D., & Bawole, H. Y. (2022). Tinjauan Hukum Banding Administrasi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Lex Et Societatis*, 10(4), 35-53.
- Rurugala, Y. P., Rompas, D. D., Rurugala, H. Y. B. Y. P., Rompas, D. D., &

- Bawole, H. Y. (2022). Tinjauan Hukum Banding Administrasi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Lex Et Societatis*, 10(4), 35-53.
- Rusli, M. (2018). Pandangan Para Ahli Terhadap Pemikiran Positivisme Hukum. *Refleksi & Aksi*, 191.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-45.
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-45
- Safiuddin, S., & Muchtasar, R. (2022). Upaya Administratif sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 208-217.
- Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental.
- Siboy, A., Al-Fatih, S., Efendi, V. D., & Hidayah, N. P. (2022). The Effectiveness of Administrative Efforts in Reducing State Administration Disputes. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 2(1).
- Sudiarawan, K. A., & Hermanto, B. (2019). Rekonstruksi Pergeseran Paradigma Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Prapemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3).
- Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*, 11(1).
- Sugiharto, H., & Abrianto, B. O. (2018). Perlindungan Hukum Non-Yudisial terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah. *Yuridika*, 33(1), 41-72.
- Sulistiyawan, A. Y., & Atmaja, A. F. P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusandi Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 482-496.
- Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif. *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160-166.
- Syuhada, O. (2020). Rekonstruksi Positivisme Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Journal Presumption of Law*,

2(2), 1-23.

Taqiuddin, H. U. (2019). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 1(2).

Wahyunadi, Y. M. (2016). Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(1), 135-154.

Wau, C. M., Hutajulu, M. J., & Dwiyatmi, S. H. (2020). Implikasi Positivisme Hukum Terkait Pengaturan Teknologi Finansial Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 3(2), 77-98.

Wulandari, D. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Renaissance*, 5(1), 32-56.

Yumarni, A. (2020). Refleksi Filosofis Dari Kisah 'Les Miserables' tinjauan Keadilan Perspektif Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2).

Peraturan Perundang-Undangan:

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 172/G/2021/PTUN-JKT tanggal 7 Desember 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 21/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 28 Maret 2022 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 506 K/TUN/2022 tanggal 20 Oktober 2022

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 99/G/TF/2021/PTUN-JKT jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/TUN/TF/2021 tertanggal 2 September 2021